

**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

ABSTRAK

Tujuan riset dilakukan agar dapat memahami pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk melakukan riset ini, perlu digunakan metode analisis kuantitatif menggunakan data sekunder melalui dokumentasi serta menggunakan bantuan SPSS 26 sebagai alat uji data. Teknik nonprobability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel. Sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 digunakan sebagai sampel dalam riset ini dan sampel yang dianalisis sebanyak 105 unit. Data yang diperlukan yaitu data yang bersumber dari e-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah (<https://jateng-ppid.bpk.go.id/>) dan masing-masing website resmi DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran legislatif dan opini audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kekayaan Daerah, Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Opini Audit BPK, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this research was to understand the influence of local government characteristics and BPK audit opinion on local government financial performance. To carry out this research, it is necessary to use quantitative analysis methods using secondary data through documentation and using SPSS 26 as a data testing tool. Nonprobability sampling technique using purposive sampling method is the technique used for sampling. A total of 35 Regencies/Cities in Central Java Province in 2017-2019 were used as samples in this study and 105 samples were analyzed. The data required is data sourced from the e-PPID of the Regional Audit Board of Central Java Province (<https://jateng-ppid.bpk.go.id/>) and the respective official websites of the Regency/Municipal DPRD in Central Java Province. The results of this study state that regional wealth, dependence on the central government and regional spending have a significant positive effect on local government financial performance, while legislative measures and BPK audit opinion have a significant negative effect on local government financial performance.

Keywords: Regional Wealth, Dependence on Central Government, Regional Expenditures, Legislative Measures, BPK Audit Opinion, Regional Government Financial Performance

Pendahuluan

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berakibat pada peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah yang terjadi pada tahun 1996-1997. Tujuan adanya peralihan yaitu agar Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan daerah serta meningkatkan kemampuan daerah tanpa adanya campur tangan dari pusat (Azhar, 2008). Pemerintah daerah memiliki karakteristik masing-masing dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan untuk daerahnya. Selain variabel Karakteristik Pemerintah Daerah serta variabel Opini Audit BPK juga terdapat variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kapabilitas wilayah untuk melakukan pengelolaan sumber keuangan dalam menyokong sistem pemerintah, pelayanan publik dan pengembangan wilayah dengan tidak mengandalkan pada pemerintah pusat (Syamsi, 1986). Keberhasilan otonomi daerah diukur menggunakan besaran Pendapatan Asli Daerah. Tetapi realitanya, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung terhadap bantuan dari pusat.

Tabel 1. Pola Hubungan Situasional Independensi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019

Persentase Rasio Kemandirian	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan Daerah	Jumlah Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah		
			2017	2018	2019
0 - 25	Instruktif	Sangat Rendah	23	26	26
25 - 50	Konsultif	Rendah	11	8	8
50 - 75	Partisipatif	Sedang	1	1	1
75 - 100	Delegatif	Tinggi	0	0	0

Sumber: Kinerja Keuangan Daerah, H. M. Idris (2018)

Dari uraian Tabel 1 disimpulkan jika Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan 2019 masih mempunyai ketergantungan besar kepada pemerintah pusat. Menurut Kusuma (2017), besarnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi rendahnya kinerja suatu Pemerintah Daerah. Tujuan dari riset ini yaitu untuk memahami pengaruh karakteristik pemerintah di daerah (kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, ukuran legislatif) dan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Kajian Pustaka

a. Teori Keagenan

Teori keagenan yaitu suatu kontrak di dalam naungan lebih dari satu agen untuk melaksanakan sejumlah pelayanan dalam melaksanakan pelimpahan kekuasaan serta pengambilan ketetapan (Jensen, 1976).

b. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan keuangan daerah merupakan proses pengawasan dan pengendalian. Pada pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Elsye et al, 2018).

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan diartikan sebagai hasil final dari kegiatan akuntansi (Machfoedz dan Mahmudi, 2008). Sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pengukuran kinerja, oleh karena itu harus disajikan secara lengkap.

d. Karakteristik Pemda

Karakteristik daerah dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi ciri khas sebuah daerah serta dapat membedakannya dari daerah lain (Nugroho, 2014). Karakter daerah adalah sebagai berikut:

1) Kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah dapat dihitung melalui PAD. PAD dapat diartikan sebagai penghasilan dari suatu wilayah bersumber dari potensi suatu wilayah dan berdampak pada pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi (Elsye, 2018). Dalam penelitian sebelumnya, Ernawati Fauziah (2017), Ni Made Suryaningsih dan Eva Ardhani Sisdyani (2016) beserta Indah Puspasari, et al (2016) menggunakan rumus PAD dibagi total pendapatan daerah selaku perhitungan tingkat kekayaan daerah.

2) Ketergantungan Terhadap Pemerintahan Pusat

Tingkat ketergantungan terhadap suatu daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. Menurut penelitian Metricia Khoerunnisa (2019) ketergantungan daerah berfokus kepada Dana Alokasi Umum (DAU). Pada penelitian Ernawati Fauziah (2017) beserta Nur Ade Novianti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa besaran ketergantungan terhadap pemerintahan pusat diperoleh dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi jumlah pendapatan secara keseluruhan.

3) Belanja Daerah

Belanja Daerah yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dan menjadi beban kas umum daerah, menurunkan pemerataan keuangan yang sedang berjalan dan harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam masa satu tahun anggaran tanpa pengembalian (Elsye, 2018). Dini Kartikasari Karno (2021) dan Mega Andani, et al (2019) menyatakan bahwa belanja daerah diperoleh dari realisasi belanja daerah yang kemudian dihitung menggunakan logaritma natural (Ln) dikarenakan terdapat perbedaan dari masing-masing belanja daerah pada tiap kabupaten/kota.

4) Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat kebijakan dalam demokrasi modern (Iksan Darmawan, 2013:74). Nurfika Irmawati Purba (2018) beserta Widyawati Pangestu (2020) melakukan riset mengenai ukuran legislatif dan disimpulkan bahwa ukuran legislatif diperoleh dari jumlah anggota DPRD pada masing-masing Kabupaten/Kota.

e. Opini Audit BPK

Tobing (2017) mendefinisikan opini audit sebagai hasil pemeriksaan auditor yang selaras dengan standar dan aturan audit, disertai mengenai opini kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa. Menurut Dini K.S. (2021) beserta Priyan Mardhya Kusuma dan Lulus Kurniasih (2017) menyatakan bahwa jika opini tidak menyatakan pendapat akan diberi nilai 1 (satu), Opini Tidak Wajar akan diberi nilai

(2), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi nilai 3 (tiga), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi nilai 4 (empat).

f. Kinerja Keuangan Pemda

Kinerja Keuangan Pemerintah menurut Rempowatu dan Tirayoh (2016) adalah kasus yang menarik perhatian saat melakukan penataan keuangan suatu negara. Dini K.S. (2021) dan Idris (2018) memakai perbandingan kemandirian untuk menghitung kinerja keuangan Pemerintah daerah. Rumus rasio independensi yaitu PAD dibagi sumber pendapatan dari eksternal dan dikalikan dengan 100 persen. Menurut Idris (2018) Paul Harsey dan Kennerth Blancard mempublikasikan hubungan situasional dalam pelaksanaan peralihan wewenang ke daerah meliputi :

a. Instruktif

Independensi daerah sebesar 0% - 25% maka dinilai sangat rendah dan tidak dapat menyelenggarakan otonomi daerah.

b. Konsultif

Independensi daerah sebesar 25% - 50% maka dinilai rendah dan sedikit mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

c. Partisipatif

Independensi daerah sebesar 50% - 75% dinilai sedang dan dapat menyelenggarakan otonomi daerah.

d. Delegatif

Independensi daerah sebesar 75% - 100% % maka dinilai tinggi dan sangat mampu melaksanakan otonomi daerah sendiri tanpa bantuan pemerintah.

2. Pengembangan Hipotesis

a. Kekayaan Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan suatu daerah dapat diketahui melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan pemerintah daerah semakin terorganisir, kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut berubah kearah yang semakin baik (Dini Kartika Sari Karno, 2021). Ernawati Fauziah (2017) menyatakan diharapkan kekayaan daerah dapat dikelola dengan baik agar daerah tersebut menjadi maju. PAD dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah daerah

untuk meningkatkan fasilitas layanan publik sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik (Priyan M.K., 2017). Berdasarkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekayaan daerah memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1: Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketergantungan pada Pemerintah Pusat diketahui dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Ernawati Fauziah (2017) menyatakan besarnya tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan lebih waspada dalam melaksanakan layanan publik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh peneliti Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) dan peneliti Indah Puspasari, et al (2017) bahwa meningkatnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat membuat kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2: Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah yaitu dana keluaran yang bersifat rutin di daerah. Besarnya belanja daerah memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui penataan belanja daerah secara hati-hati (Nur Ade Novianti dan Kiswanto, 2016). Widyawati Pangestu (2020) dan Annas L. Mappiasse (2018) mengemukakan bahwa pengeluaran daerah memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana belanja daerah yang tinggi seharusnya dapat menghasilkan kinerja yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat belanja daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3: Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peranan dari DPRD adalah menyusun kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. Menurut penelitian Nurfika Irmawati (2018), ukuran legislatif mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Meningkatnya anggota legislatif mampu memperkuat pengontrolan Pemerintah daerah dan akan berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Widyawati Pangestu (2020) mengemukakan anggota legislatif diperlukan memiliki mutu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya supaya memicu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan agar meningkatkan kinerja keuangannya. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

H4: Ukuran Legislatif Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu hasil dari pengawasan laporan keuangan dari pusat dan dari daerah. Tujuannya yaitu untuk memberikan wawasan keuangan yang telah disediakan pada laporan keuangan. Pemerintah yang memperoleh pendapat WTP mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut memperoleh kepercayaan dan dapat menjadi bukti laporan keuangan yang telah dibuat dan dilaksanakan serta telah memenuhi standar (Mega Andani, et al : 2019). Menurut Ni Made Suryaningsih (2016) banyaknya pendapat WTP dan WDP yang diperoleh pemerintah seharusnya mampu memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Opini Audit BPK mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H5: Opini Audit BPK Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah jenis riset yang digunakan dengan menggunakan data sekunder melalui dokumentasi. Populasi yang dipakai yaitu semua wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2019. Kriteria sampel yang dipakai yaitu LHP atas LKPD di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari BPK Republik Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta data anggota DPRD dari 35 Kabupaten/Kota tahun 2017-2019. Berdasarkan kriteria sampel di atas dapat diperoleh 105 unit analisis. Data yang digunakan menggunakan sumber dari e-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah (<https://jateng-ppid.bpk.go.id/>) dan masing-masing website resmi DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif berfungsi sebagai ringkasan data penelitian dengan menampilkan skor minimum, skor maksimum, skor rata-rata dan skor standar deviasi dari variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada tabel 2, variabel kekayaan daerah yang diestimasi dari PAD mempunyai skor minimal 0,10 dan skor maksimal 0,45 serta skor standar deviasi 0.06450 dan skor rata-rata sebesar 0.1787. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki skor minimal 0,28 dan skor maksimal 0,51 serta skor standar deviasi 0.03940 dan skor rata-rata 0.4491. Variabel belanja daerah yang diukur dari anggaran belanja daerah mempunyai skor minimum 27,47 dan skor maksimum 29,16 dengan skor standar deviasi 0.31887 dan skor rata-rata 28.2153. Variabel ukuran legislatif dihitung melalui jumlah anggota DPRD mempunyai skor minimal 25 dan skor maksimal 50 serta skor standar deviasi 7.07042 serta skor rata-rata 44.9048. Variabel opini audit BPK mempunyai skor maksimal 4 dan skor minimal 3 serta skor standar deviasi 0.21398 dan skor rata-rata 3.9524 . Untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dihitung berdasarkan rasio kemandirian daerah mempunyai skor minimal 12.64 dan skor maksimal 86.61 serta skor standar deviasi 12.29597 dan skor rata-rata 24.2316. Kesimpulan dari uji ini yaitu bahwa rata-rata kinerja keuangan pemda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 tergolong memuaskan.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kekayaan Daerah	105	0.10	0.45	0.1787	0.06450
Ketertanggungn Pada PP	105	0.28	0.51	0.4491	0.03940
Belanja Daerah	105	27.47	29.16	28.2153	0.31887
Ukuran Legislatif	105	25.00	50.00	44.9048	7.07042
Skor Opini Audit BPK	105	3.00	4.00	3.9524	0.21398
Kinerja Keuangan Pemda	105	12.64	86.61	24.2316	12.29597
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Uji normalitas dihitung menggunakan *one sample Kolmogrov-Smirnov*. Uji normalitas dapat disimpulkan normal apabila nilai *asympt* lebih besar dari nilai α ($asympt > \alpha$). Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diperoleh skor *asympt. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,200 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov*

Hasil Uji Normalitas		Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	Unstandardized Residual 0,200 ^c	Berdistribusi Normal

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dalam uji multikolinearitas, apabila skor VIF mendapatkan < 10 dan skor *tolerance* $> 0,1$ maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4 diketahui jika seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan	
			Terjadi Multikolinearitas	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kekayaan Daerah	0.763	1.311		V
Ketertanggungn pada PP	0.504	1.985		V
Belanja Daerah	0.436	2.291		V
Ukuran Legislatif	0.576	1.737		V
Opini Audit BPK	0.949	1.054		V

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Uji Glejser digunakan dalam menguji heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil berikut dapat diketahui jika seluruh variabel memiliki nilai Sig. $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan	
		Terjadi Heteroskedastisitas	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kekayaan Daerah	0.497		V
Ketergantungan Pada PP	0.141		V
Belanja Daerah	0.057		V
Ukuran Legislatif	0.845		V
Opini Audit BPK	0.085		V

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Uji yang dipakai dalam uji autokorelasi yaitu uji Durbin–Watson. Apabila nilai pengujian < 1 ataupun > 3 diindikasikan terjadi autokorelasi. Dari hasil uji tabel 6 disimpulkan jika nilai uji Durbin-Watson yaitu 2,154 sehingga dapat disimpulkan hasil uji tidak mengalami gejala autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b	
	Uji Durbin-Watson	
1	2,154	

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tujuan analisis determinasi adalah menilai kemampuan model dalam mengidentifikasi beberapa pengaruh variabel bebas yang ditunjukkan oleh nilai adjusted R^2 . Berdasarkan tabel 7, nilai adjust R^2 bisa disimpulkan jika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat memperoleh skor 97,3%. Sedangkan 2,7% dapat dijelaskan oleh penyebab lain yang tidak diperhitungkan dalam model.

Tabel 7. Hasil Analisis Determinasi

Model	R	Model Summary ^b	
		R ²	Adjusted R ²
1	0.987 ^a	0.974	0.973

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Pada Uji F jika skor signifikan $F > 0,05$ maka kesimpulannya yaitu variabel bebas mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil tes didapatkan skor sebesar 0,000 dan membuktikan bahwa secara simultan kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi variabel kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, ukuran legislatif dan opini audit BPK.

Tabel 8. Hasil Uji F

Nilai Sig Uji F	Ketentuan	Keterangan
0,000	< 0,05	Berpengaruh

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap pada variabel terikat (Y). Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji T

Variabel Independen	B	t _{hitung}	Sig
(Constant)	-78.286		0.006
Kekayaan Daerah	177.407	50.283	0.000
Ketergantungan Pada PP	-33.279	-4.682	0.000
Belanja Daerah	3.135	3.324	0.001
Ukuran Legislatif	-0.013	-0.356	0.722
Skor Opini Audit BPK	-0.533	-0.559	0.577

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Persamaan regresi yang dapat dihasilkan:

$$Y = -78.286 + 177.407X_1 - 33.279X_2 + 3.135X_3 - 0,013X_4 - 0.533X_5 + e$$

Dalam uji T Apabila nilai signifikansi T lebih besar (>) dari 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variable independen dengan variabel dependen. Dari olah data tersebut dapat

direpresentasikan bahwa variabel kekayaan daerah (X1) menghasilkan $t^{\text{terhitung}}$ sebesar 50.283 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan akibatnya H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat (X2) menghasilkan skor $t^{\text{terhitung}}$ sebesar -4.682 dan skor signifikansi 0,000 akibatnya H2 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel belanja daerah (X3) menghasilkan skor $t^{\text{terhitung}}$ 3.324 dan skor signifikansi 0,001 dan akibatnya H3 diterima. Dapat disimpulkan jika variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh secara positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel ukuran legislatif (X4) menghasilkan skor $t^{\text{terhitung}}$ -0.356 dan skor signifikansi 0,722 akibatnya H4 ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran legislatif memiliki pengaruh negatif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel opini audit BPK (X5) memiliki skor $t^{\text{terhitung}}$ sebesar -0.559 dan tingkat signifikansi 0,577 akibatnya H5 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit BPK memiliki pengaruh negatif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan mengenai riset ini yaitu kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif signifikan dengan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Kabupaten/Kota yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan andil dengan total pendapatan dari kabupaten/kota (Dini Kartika Sari, 2021). Pemerintah yang memiliki PAD besar secara leluasa bisa memakai kekayaan asli daerahnya dengan melakukan realisasi anggaran yang berorientasi pada kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menghasilkan kinerja yang baik bagi pemerintah daerah (Priyan Mardhya, 2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah secara positif signifikan dipengaruhi pada ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menyebabkan aktualisasi tugas oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan lebih hati-hati (Ernawati Fauziah, 2017). Hubungan antara kinerja keuangan pemerintah pusat dengan belanja daerah memiliki pengaruh secara positif signifikan. Dengan anggaran belanja yang tinggi, Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk dapat

mengembangkan kinerja pemerintah daerah kepada publik dan pemerintah mengemban tugas untuk mengelola keuangan tersebut dengan tepat (Annas L. Mappiase, 2018). Besaran suatu legislatif secara negatif signifikan dipengaruhi oleh proses kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh Nurfika Irmawati (2018) menyatakan bahwa dengan semakin bertambah banyaknya jumlah anggota legislatif dapat menyebabkan turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik tidak diperankan oleh anggota DPRD. Variabel opini audit BPK memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak adanya jaminan bahwa opini audit yang baik merupakan cerminan dari kinerja keuangan pemerintah menjadi baik (Annas, 2018). Hal ini disebabkan karena BPK hanya memeriksa tata kelola keuangan pada LKPD, dan dalam menghasilkan opini dari BPK, tindakan yang dilakukan adalah mengambil sampel tanpa pemeriksaan terhadap LKPD secara keseluruhan (Nurfika Irmawati, 2018).

Saran terbaik bagi pemerintah adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangannya yang akibatnya dapat menghasilkan kinerja yang terbaik. Saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu disarankan mencari dan menggunakan variabel independen lainnya seperti temuan audit BPK dan juga menggunakan rasio lain seperti rasio aktivitas dan rasio evisiensi; serta disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas cakupannya dan melakukan penelitian di periode yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Andani, Mega, et al. 2019. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia*; Volume 9, Nomor 2, Halaman: 111-130.
- Azhar. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Jurnal. Universitas Sumatera Utara.
- Elsye, et al. 2018. *Pemeriksaan Keuangan Daerah*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- E-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* www.jateng-ppid.bpk.go.id/ (diakses pada tanggal 27/09/2022)

- E-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* www.jateng-ppid.bpk.go.id/ (diakses pada tanggal 27/09/2022)
- E-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Perwakilan Jawa Tengah. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* www.jateng-ppid.bpk.go.id/ (diakses pada tanggal 27/09/2022)
- Fauziah, E. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015*. Jurnal. Universitas Sumatera Utara.
- Karno, D. K. S. (2021). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. *Inspirasi Ekonomi Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 40-55.
- Kusuma, P. M., & Kurniasih, L. (2017). *Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *EQUITY Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 20(1).
- Machfoedz, Mas’ud dan Mahmudi. 2008. *Materi Pokok Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Universitas Terbuka.